

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Evaluasi**

Sangat perlu untuk menentukan bagaimana program yang sesungguhnya berjalan, untuk mengukur hasil kondisi-kondisi pelaksanaan dan menyelidiki apakah program dilaksanakan sesuai dengan apa yang di inginkan dan apabila tidak, berada dalam posisi untuk menghentikan atau memperbaiki. Penyelidikan yang diperlukan ini disebut suatu evaluasi. Evaluasi dalam penggunaannya yang paling umum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan nilai (*value*). Evaluasi dianggap sebagai cara untuk menerapkan secara sistematis ide pengujian eksperimental atas pilihan kebijakan dalam lingkungan yang terkontrol (Frank 2018).

Kebutuhan dan tuntutan yang dipertanggungjawabkan menimbulkan suatu kebutuhan sehingga dilakukannya evaluasi. Tanggungjawab ini tidak hanya pada suatu aktivitas saja, tetapi juga untuk memperbaiki pelaksanaan program dan perkembangan masyarakat. Menurut Wirawan (2015) evaluasi adalah : “Sebuah riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.”

Definisi lain dikemukakan oleh Worthen dan Sanders, 1973 (dalam Arikunto,2010). Dua ahli tersebut mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang suatu informasi dan juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

##### **2.1.1 Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi dapat memberikan informasi mengenai kinerja kebijakan (*policy performance*), sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai dan implikasi sosialnya. Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial

kebijakan atau program dan bukan sekedar menumpulkan informasi mengenai hasil kebijakan. Evaluasi merupakan proses untuk membantu memahami kebijakan melalui kajian yang sistematis yang menjelaskan implementasi kebijakan, efek, justifikasinya, dan implikasi sosialnya. Bdjuri dan Yunowo (2012) menyatakan evaluasi kebijakan setidak-tidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu:

- a. Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya.
- b. Untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan.
- c. Untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Evaluasi Kebijakan publik memiliki tipe dan pendekatan yang beragam dan berbeda, tergantung dari pada tujuan ataupun sudut pandang dari para evaluator yang akan melakukan evaluasi. Dunn (2003) membagi pendekatan evaluasi menjadi tiga bagian antara lain:

- a. Evaluasi Semu

Evaluasi Semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut secara individu. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial.

- b. Evaluasi Formal

Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghimpun informasi yang valid mengenai hasil kebijakan dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga administratif kebijakan. Asumsi utama dari evaluasi formal

adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

c. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis (*decision theoretic evaluation*) adalah penekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Asumsi dari evaluasi teoritis keputusan adalah bahwa tujuan dan sasaran dari pelaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal maupun secara tersembunyi merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan dan program.

## 2.2 Pariwisata

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata, kepariwisataan, asas kepariwisataan, tujuan kepariwisataan, prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah sebagai berikut:

- a. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Kepariwisataan adalah keseluruhan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
- c. Kepariwisataan yaitu diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.
- d. Kepariwisataan yaitu bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antarbangsa.

- e. Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah sebagai berikut:
1. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawatahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan natra manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.
  2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal.
  3. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.
  4. Memelihara kelestarian dan lingkungan hidup.
  5. Memberdayakan masyarakat setempat.
  6. Menjamin keterpaduan antar sektirm antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam rangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.
  7. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.
  8. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2.2.1 Komponen Utama Pariwisata

Komponen utama yang mempengaruhi pengembangan wisata suatu tempat yaitu sebagai berikut:

- A. Atraksi atau *attraction*, tiga hal yang akan dilakukan oleh wisatawan pada daya tarik wisata yaitu sebagai berikut:
  1. Sesuatu yang dapat dilihat (Something to see),
  2. Sesuatu yang dapat dilakukan (Something to do),
  3. Sesuatu yang dapat dibeli (Something to buy).
- B. Aksesibilitas atau *accessibility*, yaitu berkaitan dengan
  1. Akses jalan yang mudah seperti adanya jalan tol
  2. Stasiun atau transportasi seperti transportasi umum karena transportasi dapat mempermudah wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata.
  3. Sign board atau petunjuk arah menuju lokasi wisata.

- C. Amenitas atau *amenities*, yaitu berkaitan dengan akomodasi yang dapat menunjang wisatawan-wisatawan bahkan wisatawan mancanegara, seperti dengan adanya:
  - 1. Penginapan
  - 2. Hotel
  - 3. Rumah masyarakat sekitar yang disewakan/homestay
  - 4. Warung atau minimarket.
- D. Pelayanan Tambahan atau *Ancillary*, yaitu merupakan dukungan yang disediakan oleh organisasi, pemerintah daerah, kelompok atau pengelola destinasi wisata untuk menyelenggarakan kegiatan wisata (Cooper dkk, 2000). Hal yang sama juga disampaikan oleh Wargenau dan Deborah dalam sugiama (2011) bahwa ancillary adalah organisasi pemerintah, asosiasi kepariwisataan, tour operator dan lain-lain. Dalam hal ini organisasi dapat berupa kebijakan dan dukungan yang diberikan pemerintah atau organisasi untuk terselenggaranya kegiatan wisata.

### **2.3 Pariwisata Berkelanjutan**

Pariwisata berkelanjutan yang didefinisikan oleh The World Tourism Organization (UNWTO) adalah pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan sekarang dan yang akan datang, menjawab kebutuhan pengunjung, industri (Pariwisata), lingkungan dan masyarakat lokal tuan rumah (kemenkraf, 2022). Pariwisata berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai pembangunan yang mendukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat yang artinya pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan sebuah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya alam dan budaya secara berkelanjutan. Tujuan dasar dari pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah tercapainya keseimbangan antara lingkungan pariwisata, kebutuhan lokal masyarakat dan kebutuhan wisatawan. Pariwisata berkelanjutan merupakan salah satu instrumen yang mempunyai peran besar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang menjadi program PBB (SDGS).

### **2.3.1 Prinsip Pariwisata Berkelanjutan**

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dicapai dengan menyeimbangkan ketiga elemen utama dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial sebagai berikut:

#### **a. Lingkungan**

Kawasan wisata alam selalu memiliki potensi sumberdaya alam berupa flora, fauna, ekosistem, fenomena alam dan budaya masyarakat sekitar yang sangat unik, khas, orisinal, beragam, dan potensial memiliki daya tarik sebagai objek dan tujuan pariwisata. Potensi pariwisata tersebut merupakan peluang industri pariwisata yang menciptakan pengembangan pemanfaatan dari potensi daya tarik alam lingkungan dan budaya di destinasi, disamping merupakan tantangan di dalam keterpaduan pemanfaatan dan konservasi secara berkelanjutan, sehingga mampu mengendalikan kemungkinan kerusakan dan menurunnya potensi daya tarik objek wisata kerusakan dan penurunan kualitas potensi daya tarik alam lingkungan dan budaya tersebut merupakan ancaman potensial bagi kelangsungan dan keberlanjutan pengembangan bisnis pariwisata. Oleh karena itu, pengelolaan wisata dalam suatu kawasan dituntut mampu mengidentifikasi dan memahami potensi daya tarik objek pariwisata, kemampuan daya dukung alam lingkungan dan gangguan yang memungkinkan mempengaruhi proses ekologi.

#### **b. Ekonomi**

Pengembangan destinasi wisata berupaya untuk memanfaatkan dan menjual potensi alam dan budaya yang masih asli (nature), serta merupakan industri pariwisata yang cenderung berkembang dengan pesat seiring dengan meningkatnya kecenderungan minat masyarakat untuk menikmati alam lingkungannya (back to nature), kemajuan dan kemudahan akses mencapai lokasi objek pariwisata dan meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat setempat daerah pariwisata. Sebagai mata rantai alat pemberdaya ekonomi masyarakat, juga merupakan sebagai salah satu yang dipercaya mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya lapangan kerja baru, sumber pendapatan bagi masyarakat, aktivitas jasa industri pariwisata yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan aktivitas ekonomi pada daerah-daerah sekitar

yang belum berkembang dan tersentuh pembangunan. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata di beberapa lokasi dapat memberikan dampak positif dari segi ekonomi kepada masyarakat sekitar. Bahkan menunjukkan kecenderungan kenaikan tingkat pendapatan masyarakat.

### c. Sosial

Dampak pariwisata terhadap situasi sosial dan budaya masyarakat lokal tidak boleh diabaikan. Dampaknya bisa bersifat positif maupun bersifat negatif. Pendekatan pariwisata berkelanjutan dirancang untuk mendorong terjadinya dampak positif pembangunan pariwisata terhadap nilai-nilai sosial dan budaya setempat, dan mengenali serta mengelola setiap dampak negatifnya. Permasalahan mungkin timbul, bila masyarakat setempat harus memperjuangkan sumberdaya sendiri dan terasing dari kenyamanan yang dinikmati wisatawan dan juga oleh perilaku wisatawan tak sesuai dengan nilai-nilai setempat. Pendekatan berkelanjutan dalam pembangunan pariwisata menawarkan lingkungan yang lebih baik untuk masyarakat dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan menempatkan budaya lokal sebagai bagian atau bahkan menjadi inti produk pariwisata. Dengan menambahkan pendekatan keberlanjutan dalam pembangunan kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat lokal melalui pendidikan, komunikasi, penguatan toleransi dan rasa hormat, pertukaran budaya, kerjasama dan kedamaian dapat tercapai. Implementasi pariwisata berkelanjutan bukanlah suatu yang sederhana untuk dilakukan, diperlukan pemberdayaan masyarakat lokal yang berkesimbangan melalui pendidikan, komunikasi, dan persuasi yang positif agar supaya terjadi penguatan toleransi dan rasa hormat, pertukaran sosial budaya, kerjasama dan perdamaian dapat tercapai. Pada saat yang sama kebanggaan yang lebih kuat dalam budaya lokal dan juga revitalisasi tradisi diharapkan dapat digalakkan juga (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2018).

## **2.4 Pengelolaan Pariwisata**

Destinasi pariwisata terbentuk dari konstruksi ruang, sosial, budaya, lingkungan dan sumber daya pariwisata yang saling terkait dan saling melengkapi dalam rangka menciptakan pengalaman pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan destinasi dilakukan melalui berbagai intervensi dari sejumlah stakeholder untuk

meningkatkan investasi aktivitas pariwisata. Berbagai upaya untuk membangun daya saing dilakukan melalui *knowledge creating organization and knowledge network* sebagaimana diungkapkan oleh Nonaka dan Tkeuchi (1996). Konvergensi melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang diarahkan kepada fokus dan sinergi sistem yang dapat menciptakan peluang untuk meningkatkan kapasitas dan tata kelola destinasi. Analisis sistem kepariwisataan yang dikembangkan oleh Leiper (1990) menempatkan destinasi pariwisata sebagai bagian dari kerangka manajemen pembangunan kepariwisataan yang harus didasarkan pada prinsip kolaboratif, berkelanjutan dan partisipatif. Hal ini dilakukan melalui peningkatan akuntabilitas pengelolaan pariwisata. (Cooper, 2005).

Pengelolaan mengandung pengertian *governance*, mengelola, mengatur dan menata. Oleh karena itu, tata kelola destinasi sebagai *destination governance* mengandung pengertian sebagai rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaannya, serta pengendalian suatu destinasi. Pengelolaan destinasi juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan destinasi. Pihak-pihak utama dalam pengelolaan destinasi adalah pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal destinasi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk pemerintah, investor, pelanggan dll. dalam perspektif ini pengelolaan destinasi pariwisata merupakan rangkaian tindakan dan upaya untuk meningkatkan kapasitas destinasi melalui perencanaan yang matang, implementasi yang konsisten dan pengendalian yang cermat untuk mengoptimalkan daya tarik, aksesibilitas, dan fasilitas serta masyarakat dalam rangka perolehan manfaat secara ekologi, sosial dan ekonomis.

## **2.5 Ekowisata**

Ekowisata merupakan aktivitas kepariwisataan yang menjadikan sumberdaya alam sebagai pusat perhatiannya, hal ini yang membedakannya dengan wisata konvensional (pariwisata massal). Ekowisata merupakan salah satu implementasi dari pariwisata berkelanjutan. Masyarakat ekowisata internasional mendefinisikan sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggungjawab dengan cara mengonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (*responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the well-being of local people*) (TIES,2000). Panos dalam (Damanik & Weber, 2006) mendefinisikan

ekowisata adalah bentuk industri pariwisata berbasis lingkungan yang memberikan dampak kecil bagi kerusakan alam dan budaya lokal sekaligus menciptakan peluang kerja dan pendapatan serta membantu kegiatan konservasi alam itu sendiri.

Fennell (1999; 39-41) menyebutkan bahwa terdapat 6 prinsip dasar ekowisata, yaitu:

- a. Meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat lokal.
- b. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pada pengunjung maupun penduduk lokal.
- c. Berfungsi sebagai sarana edukasi dan penelitian bagi para akademisi maupun peneliti.
- d. Memberikan dampak positif berupa kontribusi langsung untuk kegiatan konservasi yang melibatkan berbagai stakeholders.
- e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan ekowisata.
- f. Memberi manfaat ekonomi bagi penduduk lokal di kawasan ekowisata.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

**TABEL II-1**

**PENELITIAN TERDAHULU**

No	Judul	Penulis	Vol (nomor): hal. Penerbit	Metode penelitian	Hasil dan Pembahasan
1	Evaluasi Penerapan Prinsip-prinsip dan Kriteria Ekowisata di Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi	Sri Widowati dan Nyoman Mastiani Nadra	Vol. 3, No.3 Nopember 2013.  Jurnal Soisial dan Humanira	Data Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data adalah menggunakan observasi, wawancara studi Pustaka dan dokumentasi. Serta menggunakan evaluasi formatif.	Evaluasi hasil prinsip dan kriteria ekowisata di objek wisata alam Ijen Creater di Desa Taman Sari Banyuwangi dalam beberapa hal sudah ada kesesuaian berdasarkan prinsip dan kriteria dari Hasil Lokakarya dalam

No	Judul	Penulis	Vol (nomor): hal. Penerbit	Metode penelitian	Hasil dan Pembahasan
					pelatihan Ekowisata nasional bali, tetapi ada juga ketidaksesuaian berdasarkan prinsip dan kriteria ekowisata dikarenakan belum adanya keterlibatan masyarakat local dan pengembangan pariwisata yang belum optimal.
2	Evaluasi Pengelolaan Ekowisata di Kawasan Ekowisata Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser Sumatera Utara	Tri Rizkiana Yusnikusumah dan Endah Sulystiawati	Vol.27, No.3 Desember 2016: pp.173-189  Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota	Menggunakan metode observasi lapangan serta studi dokumen serta wawancara pengisian kuesioner yang dilakukan untuk penilaian pengelolaan ekowisata	Kolaborasi partisipatif masyarakat dalam pengelolaan dan potensi wisata yang ada menjadi nilai lebih ekowisata Tangkahan dibandingkan dengan ekowisata lainnya. Pengelola juga belum bisa melakukan konservasi budaya local, serta belum dapat mengolah data administrasi kelembagaan dengan baik. Kegiatan promosi oleh pengelola masih kurang.

No	Judul	Penulis	Vol (nomor): hal. Penerbit	Metode penelitian	Hasil dan Pembahasan
3	Evaluasi Pengelolaan Ekowisata : A <i>systematic Literature Review</i>	Asfarony Hendra Nazwin dan Rahmad Hidayat	Vol. 8, No.3 Desember 2022  Jurnal Administrasi Publik	Metode yang digunakan adalah <i>Systematic Litelatur review</i> dengan mengikuti saran pelaporan dari flow diagram	Ekowisata merupakan hasil dari transformasi mass tourism, evaluasi pengelolaan ekowisata oleh banyak peneliti menawarkan focus dimensi yang sama (sosial, ekonomi lingkungan dan kelembagaan). Dari dimensi tersebut perlu adanya penekanan pada kebijakan dan peran aktif dari pemangku kepentingan yakni pemerintah dan peran stakeholder lainnya.
4	Evaluasi Pengembang an Ekowisata di Kawasan Tahura Ngurai Rai	Putu Ika Wahyuni, IPG Ardhana dan I Nyoman Sunarta	Maret, 2018	Analisis deskriptif dengan menggunakan data wawancara, observasi dan studi litelatir yang selanjutnya dikomparasi dengan prinsip dan kriteria ekowisata.	Dari 9 prinsip yang dijelaskan hanya prinsip yang ke-5 dan ke-6 yang pelaksanaannya kurang dari 50%, dapat disimpulkan pengembangan ekowisata mangrove sudah memenuhi prinsip/kriteria ekowisata nasional. Tetapi Partisipasi masyarakat dan lain

No	Judul	Penulis	Vol (nomor): hal. Penerbit	Metode penelitian	Hasil dan Pembahasan
					lain tidak berjalan sebagaimana mestinya.
5	Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana untuk Kegiatan Ekowisata	I wayan Runa	Vol 2, No.1 April 2022  Jurnal Kajian Bali	Metode yang digunakan adalah Litelatur review	Kegiatan ekowisata dibarengi dengan pemahaman konsep (prinsip dan kriteria) yang benar, penetapan standar, dan sertifikasi. konsep Tri Hita Karana menjadi penting untuk membumikan pembangunan berkelanjutan
6	Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan pada Kawasan Geopark Ngarai Sianok Maninjau di Kota Bukit Tinggi.	Nur Fadisa, Syamsurizaldi dan Hendri Koeswara.	Vol.3 No.2 Desember 2021  Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan	Deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.	pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Geopark Ngarai Sianok memberikan dampak positif kepada sektor pariwisata Kota Bukittinggi. Hal ini dilihat dari peningkatan PAD Kota Bukittinggi yang meningkat setiap tahunnya. Dari dimensi lingkungan pembangunan yang ada tidak terpengaruh bagi ekosistem di Kawasan Geopark

No	Judul	Penulis	Vol (nomor): hal. Penerbit	Metode penelitian	Hasil dan Pembahasan
					Ngarai Sianok Maninjau.
7	Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Karimunjawa	Sri Nurhayati Qodriyatun	Vol.9 No.2 Desember 2018  Jurnal Masalah- Masalah Sosial	metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen.	Pengembangan pariwisata di Karimunjawa belum berkelanjutan. Karena meskipun secara ekonomi telah membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan masyarakat, tapi secara sosial terjadi perubahan nilai masyarakat dan secara ekologis telah terjadi kerusakan lingkungan karena kurangnya stakeholder dalam pengeolaan.
8	Dampak Pengelolaan Taman Wisata Alam Kawah Putih terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat	Sopa Martina	Vol.1 No.2 September 2014  Jurnal Pariwisata	Metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi secara langsung	kegiatan pariwisata di taman wisata kawah putih berpengaruh positif karena dapat dilihat dari segi ekonomi yang meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dalam segi sosial adalah masalah luntarnya

No	Judul	Penulis	Vol (nomor): hal. Penerbit	Metode penelitian	Hasil dan Pembahasan
					nilai nilai norma masyarakat setempat yang cenderung meniru perilaku wisatawan yang berkunjung dari luar daerah bahkan dari luar negeri.
9	Analisis Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Taman Wisata Alam Gunung Papandayan Pasca Covid-19	Dani Adiatma, Deden Firman Syuyaman dan Tasya Utami	Vo.6 No.1 2023 Jurnal Industri Pariwisata	Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.	Sektor pariwisata mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid -19. Untuk menerapkan pariwisata berkelanjutan pengelola malakukan kewajiban pembangunan sesuai RKT (Rencana Kinerja Tahunan) per tahun dan per 5 tahun seperti perbaikan atau membangun objek baru yang memperhatikan lingkungan dan menimbulkan inovasi baru agar berkelanjutan.
10	Penerapan Prinsip Ekowisata dalam	Fitriawati dan Djoko Santoso Abi Suroso	Vol.12 No.1 Desember 2022	Metode kualitatif	Pelaksanaan ekowisata di Kawasan kawah ijen belum memenuhi prinsip ekowisata

No	Judul	Penulis	Vol (nomor): hal. Penerbit	Metode penelitian	Hasil dan Pembahasan
	penyelenggaraan Pariwisata Alam di Taman Wisata Alam 9TWA0 Kawah Ijen		Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan		secara menyeluruh, pelaksanaan ekowisata di Kawasan tersebut cenderung memenuhi prinsip kedua yaitu peningkatan ekonomi masyarakat local sedangkan prinsip konservasi belum terlaksana dengan baik.

Sumber : Penulis,2023

**TABEL II-2**

**HASIL SINTESA PUSTAKA**

Sumber	Variabel/Indikator	Variabel/Indikator yang diambil dari penelitian
Wahyuni, P. I., Ardhana, I. P. G., & Sunarta, I. N. (2007). Evaluasi pengembangan ekowisata di kawasan Tahura Ngurah Rai. <i>Ecotrophic</i> , 4(1), 382151.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Pemanfaatan Ruang yang serasi dan seimbang sesuai ekowisata <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan bangunan suci ekowisata</li> <li>- Bangunan benda yang disakralkan</li> <li>- Program edukasi mangrove</li> <li>- Pengelolaan sarana fasilitas ekowisata</li> <li>- Kebersihan kawasan mangrove</li> <li>- Keseimbangan pemanfaatan lahan</li> <li>- Terkelolanya pengunjung wisata</li> </ul> </li> <li>• komitmen dan tanggung jawab terhadap konservasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Pemanfaatan Ruang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan sarana fasilitas ekowisata</li> <li>- Mengelola pengunjung wisata</li> </ul> </li> <li>• Keterlibatan Masyarakat Lokal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan koordinasi baik dengan masyarakat</li> </ul> </li> </ul>

Sumber	Variabel/Indikator	Variabel/Indikator yang diambil dari penelitian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan area warisan budaya sebagai objek ekowisata</li> <li>- Melestarikan cagarbudaya dan keanekaragaman hayati</li> <li>• Keterlibatan Masyarakat dalam Ekowisata <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan koordinasi baik dengan masyarakat setiap pengembangan.</li> <li>- Memprioritaskan masyarakat lokal</li> <li>- Melibatkan lembaga adat/tradisional tokoh masyarakat</li> </ul> </li> <li>• Promosi pemasaran ekowisata <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi pemasaran harus akurat</li> <li>- Memiliki media promosi yang dipilih sebagai target market</li> </ul> </li> </ul>	
<p>Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Permen No 9 Tahun 2021,Kemenkraf)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan kerangka pengelola <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki struktur organisasi yang terkelola</li> <li>- Memiliki rencana keuangan anggaran yang berkelanjutan</li> <li>- Memiliki SDM yang memiliki komitmen serta berpengalaman</li> </ul> </li> <li>• Mengelola tekanan perubahan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengelola jumlah dan kegiatan pengunjung</li> <li>- Memiliki sistem monitor jumlah pengunjung</li> <li>- Mengidentifikasi dampak dari kegiatan pengunjung</li> <li>- Memiliki strategi pemasaran</li> <li>- Melakukan perencanaan, pengelolaan, serta pemantauan kegiatan pariwisata</li> </ul> </li> <li>• Memberikan kebermanfaatan ekonomi lokal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki pelaporan tentang kontribusi ekonomi pariwisata</li> <li>- Memiliki data hasil pengukuran dampak ekonomi</li> <li>- Memiliki kesepakatan badan usaha pariwisata setempat</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengelola jumlah dan kegiatan pengunjung</li> <li>- Melakukan perencanaan, pengelolaan, serta pemantauan kegiatan pariwisata</li> <li>• Kebermanfaatan Ekonomi Lokal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki produk lokal yang dimanfaatkan dari masyarakat</li> <li>- Memiliki program pelatihan dan pembinaan pariwisata</li> </ul> </li> </ul>

Sumber	Variabel/Indikator	Variabel/Indikator yang diambil dari penelitian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki produk lokal yang dimanfaatkan dari masyarakat</li> <li>- Mendukung penuh keberadaan UKMKM</li> <li>- Membantu UMKM mengakses pasar pariwisata</li> <li>• Kesejahteraan dan dampak sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki hubungan dan memfasilitasi badan usaha pariwisata</li> <li>- Memiliki program pelatihan dan pembinaan pariwisata berkelanjutan</li> <li>- Melakukan sosialisasi mengenai pemberlakuan undang-undang</li> <li>- Masyarakat memiliki komitmen untuk menaati aturan.</li> <li>- Masyarakat memiliki organisasi atau kelompok yang bertanggung jawab</li> </ul> </li> <li>• Konservasi warisan alam <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki daftar situs aset warisan alam upaya perlindungan</li> <li>- Melakukan konservasi keanekaragaman hayati</li> <li>- Menjaga serta memelihara keberadaan flora fauna di kawasan destinasi</li> <li>- Memiliki sistem atau program pengendalian species</li> <li>- Mengatur pergerakan aliran pengunjung</li> </ul> </li> <li>• Pengelolaan sumberdaya <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memanfaatkan sumber daya secara lestari dalam penyelenggaraan ekowisata seperti energi terbarukan</li> <li>- Memiliki program kerja pengendalian air</li> <li>- Monitoring kualitas air pariwisata</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>berkelanjutan .</li> <li>- Masyarakat memiliki organisasi atau kelompok yang bertanggung jawab</li> <li>- Menjaga serta memelihara keberadaan flora fauna di kawasan destinasi</li> <li>- Memanfaatkan sumber daya secara lestari dalam penyelenggaraan ekowisata seperti energi terbarukan</li> </ul>

Sumber	Variabel/Indikator	Variabel/Indikator yang diambil dari penelitian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki panduan tertulis dan peraturan pengolahan limbah</li> <li>- Memiliki target pengurangan emisi</li> </ul>	
<p>Widowati, S., &amp; Nadra, N. M. (2017). Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip dan Kriteria Ekowisata di Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi. <i>Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora</i>, 3(3), 312.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga dan Memperhatikan keseimbangan Alam <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggalian begerak untuk mengurangi pemanasan bumi</li> <li>- Melakukan pengendalian kawasan sekitar kawah</li> <li>- Pembangunan pariwisata menyelaraskan norma dan adat istiadat</li> <li>- Kegiatan ekowisata yang terkoordinasi</li> </ul> </li> <li>• Konservasi alam dan warisan budaya <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki teknologi ramah lingkungan</li> <li>- Pengembangan atraksi sesuai dengan prinsip lingkungan</li> <li>- Mempromosikan hasil budaya</li> <li>- Penghijauan kawasan ekowisata</li> </ul> </li> <li>• Melibatkan lembaga adat sekitar <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ekonomi</li> <li>- Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pariwisata</li> <li>- Menyediakan fasilitas pendukung dengan dukungan lembaga masyarakat</li> <li>- Masyarakat dalam kegiatan jasa pariwisata</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengendalian kawasan sekitar kawah</li> <li>- Pengembangan atraksi sesuai dengan prinsip lingkungan</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ekonomi</li> <li>- Melibatkan masyarakat dalam Pengelolaan kegiatan pariwisata.</li> <li>- Melibatkan Masyarakat dalam Jasa Pariwisata</li> </ul>

**TABEL II-3**  
**VARIABEL DAN INDIKATOR YANG DIGUNAKAN DALAM**  
**PENELITIAN**

No	Variabel	Indikator Pemenuhan Variabel
1	Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dengan prinsip lingkungan	Pengelola melakukan pengendalian kawasan sekitar kawah agar tidak merusak lingkungan alam.
2		Pengelola memanfaatkan sumberdaya secara lestari dalam penyelenggaraan ekowisata seperti memanfaatkan energi terbarukan (gheothermal).
3		Pengelola harus mengelola jumlah pengunjung, sarana dan fasilitas sesuai dengan daya dukung lingkungan dan bersifat ramah lingkungan.
4		Pengelola Menjaga serta memelihara keberadaan satwa, tumbuhan serta bentang alam yang ada.
5		Pengelola mendukung serta mengembangkan Atraksi daya tarik wisata yang sesuai dengan prinsip lingkungan.
6		Pengelola melakukan perencanaan, Pemantauan serta Evaluasi terhadap pengembangan pariwisata sesuai dengan prinsip lingkungan
7	Kebermanfaatan Ekonomi Lokal	Jenis Produk Lokal yang dimanfaatkan dari masyarakat
8		Jasa Pariwisata yang dimanfaatkan dari masyarakat
9		Peningkatan pendapatan masyarakat dan peluang usaha masyarakat
10	Keterlibatan Masyarakat Lokal	Pengelola melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dan program kegiatan pariwisata
11		Masyarakat Memiliki organisasi atau kelompok yang bertanggung jawab atas destnasi.
12		Memiliki Program Pelatihan kepada masyarakat mengenai pariwisata berkelanjutan
13		Pengelola harus memiliki koordinasi yang baik antar pengelola dan masyarakat

*Sumber: Hasil Sintesis Tinjauan Pustaka, 2023*